

**EVALUASI PROGRAM PANGANKU DALAM MENCIPTAKAN
SISTEM PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN
(STUDI KASUS PENYEDIAAN KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN KULON PROGO)**

Ahmed Nur Prastowo

NPP. 31.0490

Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Kebijakan Publik

Email: prastowo2001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia, as an agricultural country, has 29 percent or 38.7 million people working in the agricultural sector. However, many farmers still live far from being prosperous and are even below the poverty line. In this research the author focuses on the problem of the low ability of farmers in Kulon Progo Regency to provide food aid commodities through the Panganku Program. **Purpose:** This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Panganku Program in Kulon Progo Regency. **Method:** This study uses qualitative methods and analysis of the program evaluation using Dunn's Policy Evaluation Theory. The technique of collecting data are done by interviews (15 informant), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research indicate that the implementation of the Panganku Program is considered quite effective, efficient, equitable, sufficient, responsive and on target. **Conclusion:** The implementation of the Panganku Program is considered to provide many benefits for the community, especially people who work in the agricultural sector. Through the empowerment of Gapoktan, KWT, Pokdakan, and other community groups, they can create a people-based economic system. However, the main obstacle to implementing this is the policy dynamics which often change so that there needs to be a big commitment between the regional government and the central government to support this program.

Keywords: Evaluation; Agriculture; Panganku Programs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki 29 persen atau 38,7 juta jiwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, banyak petani masih hidup jauh dari kata sejahtera bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kemampuan petani di Kabupaten Kulon Progo dalam

menyediakan komoditas bantuan pangan melalui Program Panganku. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap evaluasi program menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (15 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Panganku dinilai cukup efektif, efisien, merata, mencukupi, responsif, dan tepat sasaran. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Program Panganku dinilai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja di bidang agrikultur. Melalui pemberdayaan Gapoktan, KWT, Pokdakan, maupun kelompok masyarakat lainnya dapat mampu menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Akan tetapi, kendala utama pelaksanaan ini ada pada dinamika kebijakan yang sering berubah ubah sehingga perlu adanya komitmen besar antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung program ini.

Kata kunci: Evaluasi; Pertanian; Program Panganku

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beraktivitas di sektor pertanian. Sebesar 29 persen atau 38,7 juta jiwa penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Meskipun demikian, tidak serta merta para petani hidup dengan sejahtera. Faktanya, justru banyak petani yang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Petani di daerah semakin hari justru semakin menghadapi banyak kesulitan dan kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Kemandirian petani juga tidak terwujud, mereka terkadang masih bergantung pada tengkulak untuk mendistribusikan hasil produksi taninya.

Jika dilihat dari tingkat produktivitas padi secara lingkup regional, D.I. Yogyakarta (DIY) adalah daerah yang memiliki rata-rata produktivitas padi terendah jika dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Data juga menunjukkan tren produktivitas padi di DIY masih cenderung menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat mutu dan kualitas petani di DIY dalam memproduksi padi masih rendah dengan rata-rata produktivitas padi di DIY hanya sebesar 50,9 ku/ha (BPS, 2023).

Kabupaten Kulon Progo, salah satu kabupaten di DIY, dalam rangka melindungi serta memberdayakan petaninya, mempunyai program unggulan yaitu Program Panganku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kulon Progo yang sebesar 32 persen atau sekitar 88,1 ribu penduduk masih bekerja di sektor pertanian.

Program Panganku hadir untuk mendukung Program BPNT, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Bantuan pangan melalui skema Panganku ini disalurkan langsung melalui e-warong dengan melibatkan partisipasi aktif dari Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), dan kelompok peternak lokal sebagai penyedia komoditas. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188/520.3490 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Penyedia Komoditas Bantuan Sosial Program BPNT telah terdaftar sejumlah 92 penyedia beras, 211 penyedia sayuran, 150 penyedia telur, dan 240 penyedia daging sebagai *supplier* komoditas bantuan.

Sejarah adanya Program Panganku berawal dari Program Rasda. Program Rasda hadir untuk menggantikan Raskin yang dituangkan dalam MoU No. 501/7496 dan MoU-01/12000/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara Perum Bulog Divre DIY dengan Pemerintah Kab. Kulon Progo dalam rangka pengadaan beras Program Beras Miskin dari produksi petani Kulon Progo melalui Gapoktan berjalan efektif mulai April 2014 sampai Juli 2018. Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan launching Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Kulon Progo yang diberikan dalam bentuk non tunai dibelanjakan beras dan telur melalui e-warung. Dengan perubahan Program Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai dan selanjutnya menjadi Bantuan Sembako maka Inovasi “Mengganti Raskin menjadi Rasda” juga berganti menjadi “Panganku”.

Program Panganku dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal hasil pertanian, peternak, maupun pelaku usaha setempat dalam rangka menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan melibatkan petani mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan hingga penyaluran ke masyarakat. Dengan kata lain program ini berjalan dengan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya bahwa program ini merupakan sebuah kebijakan terintegrasi yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan perwujudan dari dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal sebagai pendukung terwujudnya misi daerah ke-2 yaitu “Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan”.

Program Panganku dilaksanakan dengan harapan dapat mewujudkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. Sistem perekonomian berbasis kerakyatan secara garis besar adalah pendekatan yang inklusif dan adil, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi ini tak sama dengan sistem ekonomi yang lain dengan lebih menekankan pada peran masyarakat sampai pada tingkat terendah untuk ikut aktif pada aktivitas perekonomian. Melalui Program Panganku masyarakat diharapkan dapat aktif dalam aktivitas perekonomian yang dibalut dalam kegiatan penyaluran BPNT sehingga akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Panganku yang dilaksanakan sejak tahun 2018 ini ternyata masih memiliki kendala yang serius. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada setiap e-warung yang ada ternyata belum semuanya menyediakan komoditas pangan yang bersumber dari petani lokal, masih ada yang bergantung pada komoditas pangan dari luar daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan, Wazan Mudzakir, STP., MPA. pada Acara Evaluasi Tahunan Program BPNT Tahun 2022, bahwa masalah utama pada pelaksanaan Program Panganku ini yaitu belum sepenuhnya petani lokal mampu memenuhi kebutuhan komoditas bantuan di e-warung. (<https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/1007/evaluasi-program-bpnt-periode-april-juni-2022>, diakses pada 3 November 2023)

Ketidakkampuan petani yang terdaftar sebagai pemasok komoditas dalam memenuhi permintaan dikarenakan masih rendahnya kemampuan serta kualitas sumber daya mereka dalam memproduksi. Ini sejalan dengan pendapat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso, dalam acara Podcast Komisi II DPRD Kulon Progo pada Jumat, 6 Oktober 2023 bahwa tidak semua petani di Kulon Progo memiliki kualitas SDM yang bagus, banyak dari mereka yang belum

mampu berinvestasi untuk menggunakan teknologi. Hal ini akibat oleh rendahnya aksesibilitas petani akan informasi dan teknologi yang ada. (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/06/514/1150880/komisi-ii-dprd-kulonprogo-dorong-penggunaan-teknologi-untuk-optimasi-pertanian-hortikultura>, diakses pada 11 November 2023)

Ketidakmampuan petani tersebut juga didukung oleh tingkat produktivitas komoditas bantuan seperti beras, daging, dan telur di Kabupaten Kulon Progo yang kian menurun sedangkan kebutuhan akan pemenuhan komoditas bantuan untuk Program BPNT semakin meningkat. BPS Kulon Progo (2023) mengungkapkan bahwa jumlah produksi pada komoditas beras, daging, dan telur sebagai komoditas utama untuk bantuan BPNT di Kabupaten Kulon Progo pada 5 (lima) tahun terakhir masih cenderung menurun. Produksi beras di Kabupaten Kulon Progo belum konsisten mengalami peningkatan untuk mengimbangi kebutuhan pada e-warong yang justru kian meningkat. Dari 2018 sampai dengan 2022, jumlah produksi beras justru mengalami penurunan hingga pada satu tahun terakhir mencapai sebesar 3.397 ton beras. Produktivitas pada komoditas telur dan daging juga cenderung menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jumlah produksi daging di Kulon Progo mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai 2022 yaitu dengan total penurunan sebesar 1.646.995 kg. Jumlah produksi telur juga demikian, mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 sampai 2022 dengan total penurunan sebesar 4.804.067 kg. Sedangkan, jika dilihat tren jumlah KPM penerima Program BPNT justru meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dengan rata-rata peningkatan sebesar 13.166 KPM/tahun (Dinas Sosial dan PPPA Kulon Progo, 2023).

Selanjutnya juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani, sebagai kelompok sasaran pada Program Panganku. BPS DIY (2023) menunjukkan besaran Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kulon Progo masih cenderung menurun sejak 2019. Puncak terburuknya yaitu pada tahun 2022 dengan besaran NTP hanya sebesar 98,4. Pada tahun 2022 menjadi yang terendah selama 4 (empat) tahun terakhir sejak dilaksanakannya Program Panganku. NTP ini menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau bayar petani yaitu produk maupun barang konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Idealnya, menurut BPS, bahwa petani dapat dikatakan sejahtera bila NTP berada pada angka 120.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, Program Panganku yang telah dilaksanakan ini dapat dikatakan masih terdapat *gap* antara yang dicita-citakan dengan realita. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi Program Panganku secara menyeluruh. Perlu dilakukan kajian evaluasi dalam rangka menganalisis masalah yang ada pada Program Panganku sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian berbasis kerakyatan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Harvey (2019) sama seperti yang peneliti lakukan yaitu mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini lebih dalam mengidentifikasi proses dan hambatan pada program pemberdayaan petani ikan Nila di Kecamatan Pangean dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam masa pendampingan telah merubah kehidupan masyarakat,

terbukti dengan mampu menjadikan masyarakat miskin memiliki peluang dan semangat untuk memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraannya. Selain itu, Basri (2018) juga melakukan penelitian yang mengkaji optimasi lahan petani di Desa Batetangga Polewali Mandar dari aspek sosial ekonomi menggunakan metode deskriptif analisis. Basri (2018) melakukan kajian evaluasi program pemberdayaan petani melalui kegiatan optimasi lahan, serta menganalisis dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan program tersebut. Manaf (2021) juga melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” dengan tujuan untuk mengevaluasi program pengadaan alat tangkap gill net nilon dalam memberdayakan nelayan di Kecamatan Tinambung. Selanjutnya, Saputra dkk. (2022) menggunakan model CIPP juga mengevaluasi program pemberdayaan petani kopi di Desa Muncar, sementara Indarti & Rahaju (2023) mengkaji pemberdayaan petani melalui Gapoktan di Desa Kesambenwetan dengan teori evaluasi kebijakan Dunn, berfokus pada peningkatan keahlian dan pengetahuan petani.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Walaupun terdapat kesamaan objek, teori, dan tujuan pada beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang penulis lakukan tetap menunjukkan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu di atas yang berkaitan pada fokus penelitiannya. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Evaluasi Program Panganku Dalam Menciptakan Sistem Perekonomian Berbasis Kerakyatan” yang berfokus pada studi kasus penyediaan komoditas BPNT di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga penelitian ini mempertegas perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah disampaikan.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, serta pelaku lainnya dalam kegiatan penyaluran BPNT melalui pemanfaatan produk lokal yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Dunn (2018) yang menyatakan bahwa evaluasi program dapat dilakukan menggunakan 6 (enam) kriteria yaitu efektivitas, efosiensi, keadilan, kecukupan, responsifitas, dan ketepatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo dalam menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Penelitian ini akan lebih berfokus untuk melihat kegiatan penyediaan komoditas untuk program BPNT yaitu berupa beras, telur, ikan lele, tahu dan tempe, gula, dan sayuran yang berasal dari produk lokal hasil panen kelompok binaan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* atau *social constructivism*. Paradigma ini memegang pandangan filosofi bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Menurut Creswell & Creswell (2018) mengemukakan bahwa paradigma berarti bahwa tujuan dalam penelitian adalah untuk memahami (atau menginterpretasikan) makna yang dimiliki

orang lain tentang dunia. Alih-alih memulai dengan suatu teori (seperti dalam postpositivisme), justru peneliti menciptakan dan mengembangkan teori atau pola makna secara induktif.

Penelitian ini memilih menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif guna menganalisis serta menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelaksanaan Program Panganku dalam mencapai suatu hasil/tujuan sesuai dengan indikator target serta melihat dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian *case study* untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kasus penyediaan komoditas BPNT pada Program Panganku. Menurut Creswell & Creswell (2018) penelitian studi kasus merupakan sebuah desain penelitian yang digunakan untuk menganalisis lebih dalam lagi mendalam sebuah kasus. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian studi kasus karena metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat capaian hasil serta dampak dari Program Panganku secara luas.

Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam memperoleh data. Dalam penentuan informan, peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data yang diperoleh dari upaya peneliti terhadap informan kemudian dianalisis. Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan model interaktif. Analisis data model interaktif terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menyajikan hasil penelitian dan menganalisis evaluasi program sesuai teori yang dikemukakan Dunn, meliputi: efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas

Pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan program, diperoleh melalui: 1) penentuan tujuan program yang sesuai dengan kondisi pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran, 2) upaya-upaya pencapaian target yang telah ditentukan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan antar stakeholder, 3) dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program berupa peningkatan pendapatan petani secara signifikan.

1.) Penentuan Tujuan Program

Penentuan tujuan program yang sesuai dengan kondisi pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran akan mempermudah pencapaian tujuan pada suatu program. Penentuan tujuan yang hendak dicapai sedapat mungkin melibatkan masyarakat yang mengetahui kondisi dirinya sendiri. Penentuan tujuan juga perlu didasarkan pada masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat untuk menghindari kesalahan tipe ketiga dalam kebijakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan dengan menentukan tujuan program telah benar-benar melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat. Tujuan program yang disusun berkembang melalui partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok tani dalam penyusunan tujuan ini menjadi kunci

keberhasilan dan relevansi Program Panganku dalam membawa perubahan positif bagi pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan tujuan juga dilakukan berdasarkan analisis kritis permasalahan serta potensi yang ada pada sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo. Artinya, proses penetapan tujuan Program Panganku telah didasarkan pada pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian serta peluang untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo. Perencanaan kritis yang dilakukan stakeholder dalam menentukan tujuan juga memperhatikan permasalahan yang ada mencakup identifikasi masalah utama yang memengaruhi sektor pertanian. Sementara itu, juga memperhatikan potensi sektor pertanian di Kulon Progo yang meliputi aspek-aspek positif seperti sumber daya alam yang kaya, keahlian petani lokal, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

2.) Upaya Pencapaian Target Yang Telah Ditentukan

Upaya-upaya pencapaian target yang telah ditentukan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan antar stakeholder. Upaya yang dilakukan melalui serangkaian langkah strategis dan kegiatan yang terencana dengan baik harus dilaksanakan melalui koordinasi yang baik serta integrasi antar dinas-dinas yang tergabung dalam tim pelaksana program. Koordinasi yang baik dan integrasi antar dinas-dinas ini dapat diwujudkan dengan adanya kegiatan seperti rapat koordinasi, forum dikusi/komunikasi, ataupun terbentuknya tim kerja.

Dari beberapa pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara penulis memberikan pandangan bahwa upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat sudah terkoordinasi dan terintegrasi. Terungkap bahwa dalam upaya pencapaian target telah dibuat tim pelaksana program dalam rangka mempermudah koordinasi dan juga pembagian tugas yang terintegrasi. Melalui terbentuknya tim tersebut, pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh pada masing-masing dinas, melalui pemberian bimbingan teknis dan manajerial untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi, dapat maksimal dalam mencapai target yang diharapkan.

3.) Dampak Yang Dirasakan

Dampak yang diharapkan dari tercapainya tujuan pelaksanaan program ini ditujukan kepada masyarakat. Petani sebagai kelompok sasaran sedapat mungkin merasakan perubahan ke arah positif akibat pelaksanaan program. Sesuai dengan asas yang dianut pada pelaksanaan program ini yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” maka masyarakat baik yang tergabung ke dalam kelompok binaan baik itu sebagai penyedia komoditas maupun sebagai penyalur bantuan dapat mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat di lapangan menggambarkan pencapaian yang positif dari pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo. Program ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. *Supplier* yang terlibat dalam program menunjukkan antusiasme dan sikap positif, mencerminkan dukungan yang kuat terhadap inisiatif ini. Selain itu, terlihat penurunan kemiskinan yang perlahan namun signifikan di Kulon Progo, serta masalah stunting juga berhasil teratasi dengan lebih mudah. Yang lebih penting, program ini telah berhasil mewujudkan tujuan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengubah kehidupan para petani yang aktif sebagai penyedia komoditas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Semangat tinggi juga terlihat dari KWT, yang menghasilkan produk panen berkualitas tinggi yang disalurkan melalui e-warung.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan juga mendukung pernyataan di atas. Hasil observasi didapatkan temuan pada beberapa *supplier* dan e-warung yang penulis amati antara lain yaitu KWT Lestari Mulya, E-Warung KUBE Barokah, Gapoktan Panca Manunggal, Pengrajin Tahu Tempe Mbah Bowo, dan Pokdakan Mina Muda Nirwana bahwa rata-rata memiliki kehidupan yang sejahtera. Program panganku dinilai berhasil mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat yang ikut andil di dalamnya.

3.2. Efisiensi

Efisiensi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Program Panganku dibandingkan dengan mekanisme penyaluran biasa dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk penggunaan sumber daya, proses distribusi, dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, indikator efisien dilihat beberapa aspek, meliputi: 1) alokasi biaya dan sumber daya (waktu, tenaga kerja, dan lain lain) yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program mencapai tujuan yang diinginkan, dan 2) pelaksanaan program dapat bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat baik dari segi sosial, perekonomian, maupun kesehatan.

1) Alokasi Biaya dan Sumber Daya

Alokasi biaya dan sumber daya baik itu berupa waktu, tenaga kerja, dan lain lain sedapat mungkin disediakan berdasarkan kebutuhan. Dinas-dinas terkait perlu menyusun perencanaan dan pengalokasian biaya dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan berdasarkan beberapa fakta hasil temuan di lapangan, maka dapat penulis telah menyimpulkan, bahwa: 1) pada pelaksanaan Program Panganku terjadi koordinasi, monitoring, dan pembinaan langsung dari Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Kelompok Peternak ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warung. Langkah ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memperkuat hubungan langsung antara produsen lokal dan konsumen akhir. Berbeda apabila masih harus melibatkan pihak lain (swasta), maka dalam melakukan monitoring dan evaluasi akan lebih menghabiskan waktu yang banyak, seperti pada daerah lain. 2) terjadi penghematan biaya muat bongkar dan transportasi karena penyaluran langsung dari produsen ke e-warung. Ini memangkas biaya logistik dan mempercepat proses distribusi, menjadikannya lebih efisien secara finansial. 3) rantai distribusi pangan dipersingkat, mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan. Ini tidak hanya menguntungkan dalam hal efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan atau kerusakan pada produk selama transportasi. 4) jumlah dan mutu bantuan beras, telur, dan sayur-buah terjamin dengan adanya pengawasan langsung dari petugas lapangan. Hal ini memberikan keyakinan kepada penerima manfaat bahwa produk yang diterimanya bermutu dan aman dikonsumsi. 5) distribusi tepat waktu dan jumlah pesanan dipastikan melalui koordinasi yang baik antara Gapoktan, KWT, dan Kelompok Peternak dengan e-warung. Ini menjaga agar pasokan pangan tersedia secara konsisten dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien. Dengan demikian, Program Panganku nyata-nyata mampu menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih efisien, ekonomis, dan berkualitas, sambil mempromosikan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal.

2) Manfaat Program

Program yang dilaksanakan dengan optimal akan memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama pada masyarakat sebagai kelompok target sasaran. Efisiensi pada program tak cukup pada pemanfaatan sumber daya yang optimal namun juga harus disertai manfaat yang diakibatkan setelahnya. Sejatinya suatu program dilaksanakan untuk memberikan manfaat pada masyarakat baik itu secara perekonomiannya, kondisi sosialnya, maupun sampai pada kondisi kesehatannya sehingga mereka mempunyai pondasi yang kuat dalam menghadapi suatu persoalan.

Program Panganku tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa akses terhadap pangan yang lebih baik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program dinilai efisien dan juga memiliki manfaat bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat baik dilihat dari segi sosial, perekonomian, maupun kesehatan. Efisiensi yang diharapkan dari program ini yaitu melalui peringkasan mekanisme pengiriman barang komoditas bantuan, peringkasan rantai koordinasi, serta memaksimalkan waktu persiapan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi telah terwujud dengan tetap mewujudkan target yang sudah ditentukan. Program Panganku dinilai berhasil mengefisienkan sumber daya dengan optimal seperti tenaga, anggaran, waktu tanpa mempengaruhi target yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem ekonomi berbasis kerakyatan.

3.3. Kecukupan

Kecukupan adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa program sudah cukup dalam memberikan sumber daya (baik finansial, tenaga kerja, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan yang diinginkan, atau apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan masalah yang sedang dihadapi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Suatu program dikatakan cukup apabila dalam pelaksanaannya mencakup pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi serta adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang jelas dalam pelaksanaan program.

1) Kecukupan Pada Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat menjadi orientasi pada pelaksanaan program. Masyarakat sebagai suatu komunitas yang telah ditentukan sebagai kelompok sasaran pada program terlebih dahulu perlu diukur kebutuhannya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menggarisbawahi pentingnya Program Panganku dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya petani, di Kabupaten Kulon Progo. Dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang, program ini dapat diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing sektor pertanian lokal. Pelaksanaan Program Panganku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani, di Kabupaten Kulon Progo. Melalui program ini, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing produk pertanian lokal. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan teknis, serta pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian.

2) Kecukupan Pada Hasil

Kecukupan pada hasil menilai bahwa hasil pelaksanaan program harus berkaitan erat dengan masalah yang hendak diatasi, atau dengan kata lain bahwa realisasi hasil pelaksanaan itu mampu berhasil mengatasi masalah yang benar. Sehingga pada pelaksanaan program ini dikatakan tepat sasaran dan menyelesaikan masalah yang memang menjadi momok di masyarakat. Ini juga dilihat dari kebijakan dalam memfasilitasi kebutuhan dalam rangka pencapaian hasil yang ingin dicapai. Artinya, keberhasilan suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mengatasi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Dengan kata lain, realisasi hasil pelaksanaan program merupakan indikator kesuksesan program tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Kesesuaian antara hasil pelaksanaan Program Panganku dengan masalah yang hendak diselesaikan berdasarkan hasil temuan di lapangan dinilai sudah sesuai. Program Panganku dinilai dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat. Dari beberapa pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Program Panganku dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo terutama yang bekerja di sektor pertanian. Selain itu, melalui Program Panganku juga membantu dalam menekan tingginya angka stunting di Kulon Progo melalui penyaluran komoditas yang bermutu dan bergizi tinggi.

3.4. Perataan

Kriteria perataan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan adil dalam memperlakukan semua kelompok yang terlibat dalam kebijakan. Keadilan dapat diukur dengan melihat distribusi manfaat kebijakan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan upaya memperlakukan semua kelompok yang terlibat dalam kebijakan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak merata. Adanya distribusi manfaat kebijakan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Program yang dilaksanakan secara merata dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi: 1) manfaat yang dirasakan sudah dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dan 2) pendistribusian tugas dan peran pada instansi maupun pihak terkait yang terlibat sebagai pelaksana program dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

1) Pendistribusian Manfaat

Manfaat dari suatu program seideal mungkin harus dirasakan oleh semua kelompok masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan membuktikan bahwa upaya distribusi manfaat program dilakukan secara merata di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam Program Panganku terutama yang menjadi penyedia komoditas belum terdistribusi sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa setiap *supplier* hanya boleh melayani satu e-waring saja dan dalam lingkup satu kapanewon. Faktanya, berdasarkan temuan di lapangan yang dicocokkan dengan data dari Dinas Sosial P3A Kulon Progo, terdapat sebanyak 7

(tujuh) *supplier* yang ditemukan menyediakan komoditas lebih dari satu e-warong dan 3 (tiga) yang melayani permintaan e-warong lintas kapanewon. Akibatnya, manfaat dari pelaksanaan Program Panganku tidak dirasakan menyeluruh oleh semua kelompok masyarakat yang bekerja di sektor pertanian pada tiap kapanewonnya, masih hanya dirasakan oleh sebagian kelompok saja yang menguasai pasar.

2) Distribusi Pelaksana

Pendistribusian tugas dan peran secara adil dalam suatu program atau kegiatan sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaannya. Distribusi yang adil memastikan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat memiliki kontribusi yang seimbang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan program. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, menghargai keragaman, dan mengurangi risiko konflik serta ketidakpuasan di antara para pelaku program.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial yang peneliti lakukan membuktikan bahwa sebetulnya pada tahap perencanaan sudah dilakukan upaya pendistribusian peran dan tugas para instansi yang tergabung dalam tim. Pendistribusian peran dan tugas ini bahkan artinya juga sudah diketahui oleh masing-masing instansi yang akan menjadi tim pelaksana program Panganku.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ini memastikan distribusi manfaat yang merata di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan melibatkan petani lokal sebagai penyedia komoditas dan menggunakan e-warong untuk distribusi, Program Panganku memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Upaya ini mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa tidak hanya satu pihak atau kelompok tertentu yang diuntungkan. Program Panganku yang terdistribusi dengan baik ini juga secara tidak langsung membuktikan keterwujudan sistem perekonomian berbasis kerakyatan yang cita-citakan. Keterwujudan sistem perekonomian berbasis kerakyatan melalui Program Panganku terlihat jelas dari pendekatan inklusif yang digunakan. Dengan memberdayakan petani lokal dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat terlibat dan diuntungkan, program ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan solidaritas sosial, dan memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

3.5. Responsivitas

Responsivitas juga termasuk dalam kategori kriteria penilaian dalam evaluasi Program Panganku. Responsivitas dapat diukur dengan melihat seberapa baik kebijakan merespons perubahan dalam tuntutan masyarakat. Dalam mengukur responsivitas program peneliti menggunakan 2 indikator pembahasan antara lain yaitu: 1) cara dan pemanfaatan sistem pelaporan pada instansi pemerintah terkait masukan dari publik mengenai pelaksanaan program, dan 2) tanggapan, respon, dan tindak lanjut *stakeholder* kebijakan atas masukan yang telah ditampung oleh sistem.

1) Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan memiliki peran yang sangat penting dalam program yang dilaksanakan secara responsif. Dengan menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan terperinci mengenai pelaksanaan program, sistem pelaporan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk

memantau, mengevaluasi, dan merespons perubahan dengan cepat dan tepat, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan program Panganku sudah direncanakan serta dilaksanakan dengan memanfaatkan segala cara untuk menciptakan sistem pelaporan yang baik. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, juga dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan memiliki catatan yang lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan program, termasuk pencapaian target, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber daya lainnya, pihak-pihak terkait dapat memastikan bahwa program dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah atau lembaga pelaksana dalam menyediakan layanan atau program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masyarakat sudah mengetahui dan mengerti bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pelaporan mengenai masalah program ini melalui aplikasi LaporanKu. Namun, beberapa dari mereka memang enggan untuk mengaksesnya. Banyak sekali sebabnya antara lain adalah banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau yang berpenghasilan rendah, mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi, seperti smartphone atau internet. Ini membuat mereka sulit untuk mengunduh, mengakses, atau menggunakan aplikasi pelaporan. Selain itu, beberapa orang mungkin tidak terbiasa atau tidak nyaman dengan penggunaan teknologi modern. Mereka mungkin merasa canggung atau tidak yakin dalam menggunakan aplikasi pelaporan karena kurangnya pemahaman atau pengalaman dengan teknologi tersebut.

2) Tindak Lanjut Atas Masukan

Pentingnya tanggapan, respon, dan tindak lanjut dari stakeholder kebijakan terhadap masukan yang telah ditampung oleh sistem adalah untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan dan pengawasan program tidak sia-sia. Tanggapan yang cepat dan responsif menunjukkan keseriusan pemerintah atau lembaga terkait dalam mendengarkan masukan masyarakat serta komitmen untuk memperbaiki atau menanggapi isu-isu yang diangkat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan menjelaskan bahwa pentingnya program dilaksanakan secara responsif adalah untuk memastikan bahwa program tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ketika sebuah program responsif, artinya program tersebut mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap tantangan, perubahan, dan kebutuhan yang muncul seiring waktu.

Pelaksanaan Program Panganku dinilai sudah cukup responsif dalam menindaklanjuti masukan. Komitmen bersama antar dinas yang terlibat menjadi dasar utama dalam menindaklanjuti masukan. Dinas yang ditunjuk sebagai pengampu *supplier* pada setiap komoditas memiliki tugas untuk membina dan memonitor/mengawasi pelaksanaan penyediaan komoditas bantuan, mulai dari kualitas mutu, kuantitas, serta kesesuaian antara harga dengan volume yang sudah ditentukan.

3.6. Ketepatan

Ketepatan sebuah program menunjukkan sejauh mana program tersebut relevan dan cocok untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi yang ada. Sebuah program akan lebih berhasil dan berdampak positif jika dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan, nilai, dan kondisi masyarakat yang dilayani. Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, program akan lebih mampu memberikan solusi yang efektif dan relevan terhadap masalah yang dihadapi oleh

masyarakat sasaran. Dalam menganalisis dan mengetahui suatu program tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi yang ada diidentifikasi melalui: 1) kesesuaian program yang dilaksanakan dengan kondisi dan karakteristik sosial masyarakat pada lokasi dimana program dilaksanakan, dan 2) kesesuaian program yang dilaksanakan dengan masalah yang hendak diselesaikan dengan kebutuhan masyarakat pada lokasi dimana program dilaksanakan.

1) Kesesuaian Kondisi dan Karakteristik Masyarakat

Kesesuaian program dengan kondisi dan karakteristik sosial masyarakat di lokasi pelaksanaan menunjukkan sejauh mana program tersebut cocok dan relevan dengan realitas lokal tempat program berjalan. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai, norma, kebiasaan, struktur sosial, dan dinamika komunitas yang ada di wilayah tersebut. Maksud dari kesesuaian ini adalah agar program dapat merespons kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dengan memahami kondisi sosial masyarakat, program dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih tepat, sehingga lebih mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari sudut pandang stakeholder kebijakan yang terlibat sebagai pelaku utama dalam Program PanganKu menilai bahwa pelaksanaan program ini sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat serta karakteristik masalah yang hendak diselesaikan. Dengan demikian, Program PanganKu telah berhasil memperlihatkan kesesuaian yang baik dengan kondisi dan karakteristik sosial masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat menjadi poin penting dalam pembangunan dan pelaksanaan program ini. Melalui musyawarah dan forum diskusi, kebutuhan riil masyarakat diidentifikasi dan menjadi dasar bagi pengembangan program. Dalam proses perencanaan, pemilihan komoditas tanaman dan produk diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal, serta dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat. Selain itu, program ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, dalam menyusun dan melaksanakan program. Keterlibatan stakeholder memastikan bahwa program dirancang dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Penggunaan teknologi yang sesuai dengan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat juga menjadi fokus, seperti penggunaan aplikasi e-warung yang dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

2) Kesesuaian Masalah Yang Hendak Diselesaikan

Kesesuaian program yang dilaksanakan dengan masalah yang hendak diselesaikan dan kebutuhan masyarakat pada lokasi pelaksanaan sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Maksudnya adalah bahwa program harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan secara mendalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di lokasi tersebut serta kebutuhan nyata yang perlu dipenuhi. Dengan memastikan kesesuaian antara program dengan masalah yang hendak diselesaikan dan kebutuhan masyarakat setempat, program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, menjelaskan bahwa Program PanganKu menjadi suatu local wisdom yang menggambarkan empati terhadap warga pra sejahtera dengan melibatkan partisipasi aktif mereka sebagai penyalur, seperti petani, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), kelompok peternak, dan e-warung, sekaligus sebagai penerima manfaat. Pendekatan ini mencerminkan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi mandiri di tingkat

lokal, di mana masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam memasok dan mendistribusikan produk pangan.

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa Program Panganku berhasil dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan masalah yang hendak diselesaikan dan kebutuhan masyarakat di lokasi pelaksanaan. Program ini dirancang sesuai dengan kondisi lokal dan karakteristik sosial masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Dengan mempertimbangkan masukan dari Musrenbang dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, Program Panganku menunjukkan ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang relevan dan mendesak. Program ini didesain untuk secara langsung mengatasi masalah kesejahteraan petani yang masih saja hidup pada garis kemiskinan. Program Panganku berhasil menanggulangi kesulitan ekonomi petani yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan Program Panganku, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa program ini menghadapi berbagai kendala dalam menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Pertama, masih banyak e-warong yang belum sepenuhnya menyediakan komoditas pangan dari petani lokal. Banyak e-warong yang masih bergantung pada komoditas pangan dari luar daerah karena petani lokal belum mampu memenuhi permintaan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diharapkan dapat memberdayakan petani lokal dan meningkatkan pendapatan mereka belum berjalan sesuai rencana.

Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan petani menjadi salah satu hambatan utama. Banyak petani di Kulon Progo yang belum mampu mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi mereka. Rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi dan teknologi terkini menyebabkan produktivitas mereka tetap rendah. Padahal, penggunaan teknologi pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi, yang pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan komoditas bantuan di e-warong.

Ketiga, produksi komoditas utama seperti beras, daging, dan telur di Kulon Progo menunjukkan tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini semakin memperburuk situasi karena kebutuhan akan komoditas tersebut di e-warong terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat program BPNT. Ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan ini menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang bertentangan dengan tujuan Program Panganku untuk memberdayakan petani lokal.

Keempat, meskipun Program Panganku bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis kerakyatan, kenyataannya program ini belum mampu secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di Kulon Progo. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo menunjukkan peningkatan, angka kemiskinan justru tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil menciptakan dampak positif yang merata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

Temuan lainnya adalah nilai tukar petani (NTP) di Kulon Progo yang cenderung menurun. NTP yang rendah mencerminkan daya beli petani yang lemah terhadap barang-barang konsumsi dan input produksi. Petani yang sejahtera diharapkan memiliki NTP yang tinggi, namun kondisi di

lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa program yang ada belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara efektif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Panganku masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Diperlukan evaluasi mendalam dan upaya perbaikan yang menyeluruh untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Langkah-langkah seperti peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan penyempurnaan sistem distribusi komoditas perlu diambil agar tujuan pemberdayaan petani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan lainnya yang signifikan adalah ketidakpastian pada kebijakan terkait Program Panganku. Kebijakan yang sering berubah-ubah telah menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program ini, mengakibatkan kurangnya hasil yang maksimal. Pertama, ketidakstabilan kebijakan menyebabkan kebingungan di kalangan petani dan pelaku usaha lokal. Kebijakan yang berubah-ubah membuat petani kesulitan dalam merencanakan dan menyesuaikan kegiatan produksi mereka. Sebagai contoh, perubahan dalam jenis komoditas yang harus disediakan atau aturan distribusi yang sering kali diubah membuat petani tidak memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam menjalankan usaha tani mereka. Akibatnya, mereka sering kali tidak siap memenuhi permintaan pasar, yang berdampak pada ketersediaan dan kualitas komoditas di e-warung.

Kedua, perubahan kebijakan yang tiba-tiba juga berdampak pada program pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada petani. Ketika kebijakan berubah, program-program pelatihan yang telah disusun sering kali harus disesuaikan atau bahkan dihentikan. Ini mengakibatkan para petani tidak mendapatkan pembekalan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bercocok tanam atau beternak. Ketidakkonsistenan ini menghambat upaya peningkatan kapasitas SDM petani yang sangat diperlukan untuk mendukung program tersebut.

Ketiga, ketidakpastian kebijakan juga mempengaruhi alokasi dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk Program Panganku. Dengan kebijakan yang sering berubah, alokasi anggaran untuk program ini sering kali tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan teknologi, serta program pendampingan, menjadi tidak efektif karena harus disesuaikan dengan kebijakan baru yang muncul.

Keempat, ketidakpastian kebijakan menyebabkan hilangnya kepercayaan di kalangan petani dan pelaku usaha lokal. Mereka menjadi ragu-ragu untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan pertanian atau peternakan karena khawatir kebijakan yang ada tidak akan bertahan lama. Ketidakpastian ini menghambat semangat dan inisiatif petani untuk berkembang dan berinovasi, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama Program Panganku yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan sistem ekonomi berbasis kerakyatan.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kebijakan yang lebih stabil dan konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat jangka panjang dan memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha lokal. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada dan melakukan penyesuaian secara terencana dan terukur. Dengan demikian, Program Panganku dapat berjalan dengan lebih efektif dan

memberikan hasil yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan sistem ekonomi berbasis kerakyatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa program tersebut telah dapat dikatakan berhasil menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Program Panganku juga dinilai tepat sasaran karena mampu mengatasi masalah kesejahteraan petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada pelaksanaannya, program ini dinilai telah mencapai baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran walaupun masih ada permasalahan yang belum dapat teratasi. Program Panganku dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengatasi berbagai masalah dengan baik. Program Panganku juga dinilai berhasil dalam mewujudkan sistem perekonomian berbasis kerakyatan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang aktif sebagai pelaku baik sebagai pemasok, pendistribusi, maupun penerima bantuan. Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo menjadi contoh konkret dari penerapan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan menyediakan saluran distribusi yang lebih adil untuk produk mereka, seperti beras, telur, dan sayur-buah. Melalui pendampingan oleh tenaga ahli, program ini berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petani sehingga dapat bersaing di pasar. Program Panganku juga berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga belum dilaksanakan secara menyeluruh serta belum dapat mewakili semua pelaku program sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang dilakukan lebih menyeluruh berkaitan dengan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Zulkifli. (2018). *Evaluasi Program Optimasi Lahan Petani Ditinjau dari Aspek Sosial Ekonomi Petani di Desa Batetangnga Polewali Mandar*. Agrovital, vol. 3, no. 1, May. 2018, pp. 28-36,
- BPS. (2023). *Buku II Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Migrasi dan Ketenagakerjaan)*.
- BPS DIY. (2023). *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023*.
- BPS Kulon Progo. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Pengeluaran 2018-2022*.

- Creswell, John W., and J. David Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Ltd. Fifth Edit. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>.
- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022*.
- Dinas Sosial PPPA Kulon Progo. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022*.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 5th edition. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663012>
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/06/514/1150880/komisi-ii-dprd-kulonprogo-dorong-penggunaan-teknologi-untuk-optimasi-pertanian-hortikultura>, diakses pada 11 November 2023
- <https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/1007/evaluasi-program-bpnt-periode-april-juni-2022>, diakses pada 3 November 2023
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor Ghalia Indonesia.
- Indarti, Fais Ariska Mirna, dan Tjitjik Rahaju. (2023). *Evaluasi Program Pemberdayaan Petani Melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Petani) Di Desa Kesambenwetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik*. Publika 11(1): 1669–80.
- Manaf, Cicci Yuliah. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4(4): 1238–51.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Saputra, Y.A., Ulum, M.C. and Sofiyudin, A. (2022). *Evaluasi Program Pemberdayaan Petani Melalui Model CIPP (Context, Input, Process, Dan Product)*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara.